

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan letak geografis yang strategis membuat Thailand menjadi kaya akan budaya dan sosial. Berlokasi di tengah-tengah Kawasan Asia Tenggara, negeri gajah putih ini menjadi salah satu negara yang di lewati jalur sutra. Dengan demikian Thailand merupakan salah satu tempat tujuan favorit para pedagang mancanegara. Populasi masyarakat Thailand yang di dominasi penganut agama Buddha (94,5%), disusul umat Islam (4,29%), Kristen (1,17%), serta agama lainnya (0,04%). Dengan demikian pengaruh dan budaya dari ajaran agama Buddha sangat kental di Thailand<sup>1</sup>. Sementara Islam menjadi agama nomor dua terbanyak di Thailand dan banyak tersebar di daerah Thailand Selatan. Di daerah ini masyarakatnya mayoritas berasal dari Melayu, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Pejabat pemerintah Thailand yang di dominasi oleh penganut ajaran Buddha kerap kali melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas yang ada di Thailand. Setelah adanya perjanjian Anglo-Siam pada tahun 1909, maka melegitimasi kekuasaan pemerintah Thailand akan wilayah Patani<sup>2</sup>. Pada tahun 1934 dibawah pemerintahan Marsekal Plaek Phibunsongkhram, pemerintah Thailand mempunyai Kebijakan „Thailandnisasi“.

---

<sup>1</sup> National Statistical Office of Thailand "Population by religion, region and area, terakhir diakses Desember 12,2015", <http://web.nso.go.th/en/survey/popchan/data/2015-2016/Statistical%20tables%20PDF.pdf>.

<sup>2</sup> Thanet Aphornsuvan, "Rebellion in Southern Thailand: Contending Histories" pp. 35

Kebijakan ini merupakan upaya mengafiliasikan budaya masyarakat Patani dan Thailand. Selain itu kebijakan ini juga bersifat menekan etnis-etnis minoritas di Thailand karena mempromosikan konsep sentralisasi pemerintah Thailand. Masyarakat Patani yang tadinya mempunyai otonomi khusus, setelah kebijakan itu tidak lagi mempunyai hak tersebut. Dengan demikian sekarang kekuasaan penuh atas seluruh wilayah bekas kerajaan Kesultanan Melayu Islam di Patani kini berada di dalam pemerintah Thailand.

Mayoritas penduduk muslim Melayu yang ada di negara Thailand terkonsentrasi di daerah Thailand Selatan. Ada tiga provinsi yang menjadi pusat tempat tinggal umat muslim Melayu, yaitu Pattani, Narathiwat, dan Yala. Persebaran umat muslim di provinsi Narathiwat sebanyak 82%, 17,9% merupakan penganut agama Buddha<sup>3</sup>. Di provinsi Pattani terdapat 86,58% umat muslim, 13,4% umat Buddha, dan 0,02% penganut kepercayaan lainnya. Dan di Provinsi Yala penduduk beragama Islam sebesar 81,46%, umat Buddha 18,45%, dan 0,09% adalah agama lain. Ketiga provinsi tersebut juga mempunyai rasio kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan dengan kota-kota lainnya. Pattani dengan rasio kemiskinan 36%, Narathiwat 37,3%, dan Yala 21,2%.<sup>4</sup> Ini merupakan ketiga kota dengan rasio kemiskinan tertinggi di provinsi Thailand Selatan. Bahasa yang digunakan di Thailand Selatan juga mayoritas adalah Bahasa

---

<sup>3</sup> Joseph Chinyong Liow. "Religion and Nationalism in Southeast Asia." Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.

<sup>4</sup> Thankitc̄hānukit Suriyon. "National Economic and Social Development Board (NESDB)." Samnak Wikhr̄q̄ Khr̄ongkān Longthun Phāk Rat Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sēthakit læ Sangkhom h̄əng Chāt Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Khītkhwāmsāmātnai Kānkh̄əngkhan kh̄ong Prathēt, 2548.

Thailand Selatan atau Pak Thai atau Dambro, sedangkan diurutkan kedua adalah Bahasa melayu Patani dengan 1,5 Juta pengguna.

Tidak hanya perlakuan diskriminasi rasial, tetapi kesenjangan dalam hal pembangunan daerah juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Thailand Selatan. Hal ini dipicu oleh perbedaan keyakinan antara para pemimpin Thailand di Bangkok dan masyarakat Melayu yang berada di Thailand Selatan. Masyarakat Melayu di Thailand Selatan di cap separatis oleh pemerintah pusat Thailand karena aksi yang dilakukan oleh pendiri Gerakan Rakyat Patani, Haji Sulog. Haji Sulog mengkampanyekan sebuah petisi yang berisi tuntutan hak otonomi, penggunaan bahasa Melayu, dan keadilan bagi masyarakat yang semuanya ada di dalam “Tujuh Perkara” atau tujuh tuntutan dari Dewan Provinsi Islam Patani. Praktis semenjak tahun 1950an masyarakat Pattani yang terinspirasi dari gerakan Gamal Abdul Nasser di Mesir, kemudian mereka membentuk BNPP (Barisan Nasional Pembebasan Patani)<sup>5</sup>. Beberapa tahun berselang BNPP berubah menjadi *Pattani United Liberation Organisation* (PULO) yang mana masih bertujuan sama yaitu menuntut hak-hak kebebasan masyarakat Thailan Selatan kepada pemerintah pusat Thailand di Bangkok<sup>6</sup>.

Aksi separatisme yang berbau kekerasan baru dimulai pada tahun 2000an. Salah satu tragedi besarnya adalah insiden masjid Krue Se. 100 militan kaum separatis

---

<sup>5</sup> Human Rights Watch “A Brief History of Insurgency in the Southern Border Provinces”, HRW.Org, diakses Februari 28, 2021. <https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0807/3.htm>

<sup>6</sup> The Jamestown Foundation “A Breakdown of Southern Thailand’s Insurgent Groups”, the Jamestown Foundation, diakses Februari 28, 2021. <https://jamestown.org/program/a-breakdown-of-southern-thailands-insurgent-groups/>

menyerang kurang lebih 10 pos polisi di Thailand Selatan. Ini membuat 32 pria bersenjata memasuki kawasan suci di masjid Krue Se, Pattani. Para petinggi militer Thailand yang berkuasa pada daerah tersebut memerintahkan untuk membunuh para teroris tersebut karena ingin menghindari simpati dari masyarakat sekitar, yang ingin menolong para teroris tersebut.

Pada tahun 2004 terjadi penangkapan terhadap enam orang yang diduga memasok senjata untuk para pemberontak. Ini terjadi di daerah Tak Bai di Provinsi Narathiwat. Adanya penangkapan ini menyebabkan terjadinya demonstrasi menuntut pembebasan enam orang tersebut. Aksi tersebut berujung ricuh karena polisi dan militer menggunakan gas air mata dan *water canon* serta mulai menembak kerumunan yang menewaskan sekitar tujuh pendemo<sup>7</sup>. Dampak dari aksi ini adalah menyebarnya aksi protes serupa di seluruh wilayah Thailand Selatan. Tidak hanya kaum muslim, namun juga kaum non-muslim juga melakukan aksi protes terhadap perlakuan pemerintah dan militer Thailand. Ini diperparah dengan pembelaan kepada aksi militer tersebut yang dilakukan oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawarta. November 2006 pemerintah Thailand menuntut 58 tersangka yang terlibat aksi demonstrasi dan ini memperburuk keamanan nasional Thailand<sup>8</sup>.

Salah satu insiden besar lainnya adalah kebutuhan antara pemberontak dan polisi

---

<sup>7</sup> Amnesty International "THAILAND: "IF YOU WANT PEACE, WORK FOR JUSTICE", Amnesty International, accessed Februari 29, 2021. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/001/2006/en/>

<sup>8</sup> Isra News "Tak Bai incident: Six years on and justice remains elusive", isranews agency, accessed Februari 29, 2021. <https://www.isranews.org/south-news/English-Article/item/2058-tak-bai-incident-six-years-on-and-justice-remains-elusive.html?pop=1&print=1&tmpl=component>

dan militer Thailand terjadi di Yala, Provinsi Thailand Selatan pada tahun 2009. Kejadian ini memakan korban 41 orang tewas dan 60 orang luka-luka. Kejadian ini merupakan kejadian terburuk selama 5 tahun terakhir.

Konflik berkepanjangan ini menyita perhatian dari masyarakat internasional, khususnya masyarakat muslim. Organisasi Kerja sama Islam (OKI) salah satu organisasi internasional yang menaruh perhatian pada isu separatisme di Thailand Selatan yang melibatkan pemberontak dan pemerintah Thailand. OKI memberi masukan kepada pemerintah Thailand untuk membuka pembicaraan damai antara pihak terkait pada tahun 2005. OKI bersedia memberikan bantuan untuk mencari jalan damai pada konflik ini.

Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara sahabat dari Thailand, Indonesia mencoba menjadi penengah konflik di Thailand Selatan. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pertemuan antara pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan pemerintahan Thailand<sup>9</sup>. Perundingan yang terjadi di istana Bogor tersebut dimaksudnya untuk membuka jalan perdamaian antar pihak yang berkonflik. Perundingan yang bersifat tertutup tersebut tidak mendapat perhatian banyak media dan kabar yang beredar pertemuan tersebut hanya berisikan bagaimana pemerintah Thailand meminta saran untuk penyelesaian

---

<sup>9</sup> Diny Nilam Sari, "RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK SEPARATIS MUSLIM DI THAILAND SELATAN", (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

konflik yang terjadi sudah terjadi selama puluhan tahun ini<sup>10</sup>.

Banyak upaya penyelesaian konflik yang tidak membuahkan hasil yang signifikan. Seperti pertemuan rutin setiap tahun di Banjarmasin yang pada tahun itu membahas tentang resolusi konflik di Thailand Selatan pada tahun 2010 oleh AICIS (*Annual Conference on Islamic Studies*)<sup>11</sup>. Sementara pada tahun 2013, pemerintah Malaysia yang menjadi mediator antara Thailand dan kelompok separatis dengan menandatangani perjanjian damai juga gagal. Ini disebabkan oleh ledakan bom di Narathiwat, Thailand Selatan yang di duga dilakukan oleh kelompok separatis.

Indonesia sebagai negara sahabat dan negara besar di Kawasan Asia Tenggara melalui pemerintah dan berbagai ormas keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan beberapa ormas lainnya telah beberapa kali menjadi penengah konflik-konflik keagamaan di Filipina (konflik Moro) dan konflik Rohingnya di Myanmar diminta untuk kembali menjadi pemberi masukan untuk konflik di Thailand Selatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan jalur diplomasi pertama dan kedua. Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam penyelesaian konflik domestik seperti konflik Poso dan Ambon. Bentuk jalur diplomasi pertama salah satunya adalah kerjasama di bidang pertahanan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Nasional Kerajaan Thailand atau Kong

---

<sup>10</sup> Diny Nilam Sari, "RESOLUSI KONFLIK KELOMPOK SEPARATIS MUSLIM DI THAILAND SELATAN", (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5

<sup>11</sup> AICIS adalah Konferensi Studi Islam Internasional tahunan yang diprakarsai oleh Kementerian Agama

Thap Thai atau Royal Thai Army (RTA). TNI dan RTA melakukan kerjasama dalam bidang intelejen, ini dilakukan demi membatasi pergerakan pemberontak di provinsi Thailand Selatan<sup>12</sup>.

Selain jalur diplomasi pertama, pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi jalur kedua. Ini merupakan pendekatan diplomasi dengan cara dialog informal dan kegiatan memecahkan masalah untuk menemukan solusi dalam resolusi konflik. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui ormas, LSM, dan kajian akademisi. Indonesia melalui PBNU dan Muhammadiyah turut serta berperan dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan menjadi mediator.

PBNU terkenal dengan metode diplomasi serta pendekatan-pendekatan yang persuasif dengan alasan itulah PBNU ditunjuk sebagai salah satu pemberi masukan untuk konflik berkepanjangan di Thailand Selatan. PBNU pertama kali diundang oleh pemerintah Thailand pada tahun 2005 dipimpin oleh KH. Hasyim Muzadi<sup>13</sup>. Terkenal dengan strategi *soft power* dalam menangani konflik, NU selalu mengedepankan resolusi konflik tanpa kekerasan. Kunjungan kedua NU mengunjungi provinsi Yala, Narathiwat, dan Pattani<sup>14</sup>.

Pengurus Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah melalui Din

---

<sup>12</sup> P Wongcha-um. (2020, January 14). "Thailand, Indonesia to share intelligence to combat insurgents." Reuters. Retrieved September 14, 2021, from <https://www.reuters.com/article/us-thailand-indonesia-army-idUSKBN1ZD1V2>.

<sup>13</sup> NU Online "Dubes Thailand Kunjungi PBNU Jelaskan Tragedi di Thailand Selatan", NU Online, accessed Februari 29, 2021. <https://www.nu.or.id/post/read/1521/dubes-thailand-kunjungi-pbnu-jelaskan-tragedi-di-thailand-selatan>

<sup>14</sup> NU Online "Rombongan PBNU Berkunjung ke Thailand", NU Online, accessed Februari 29, 2021. <https://www.nu.or.id/post/read/2895/rombongan-pbnu-berkunjung-ke-thailand>

Samsuddin selaku Ketua PP Muhammadiyah menyarankan kepada pemerintah Thailand bahwa penerapan „*soft power*“ untuk menyelesaikan konflik. Beliau menambahkan bahwa kesejahteraan masyarakat Thailand Selatan menjadi yang utama. Ada 3 hal pokok yang ditekankan oleh Din Samsudin, yaitu pertama adalah pencerahan dakwah antara ulama atau Dai Indonesia yang dikirim ke Thailand ataupun sebaliknya, kedua adalah mendirikan lembaga pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat Thailand Selatan dengan membangun ekosistem ekonomi seperti lembaga UMKM dan lembaga keuangan mikro. PP Muhammadiyah percaya bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Thailand Selatan adalah kunci dari konflik ini. Muhammadiyah sendiri telah mendapatkan tanah seluas 7 hektar dari pemerintah Thailand untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam. Rencananya ini akan dibangun sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA<sup>15</sup>.

Sebenarnya masih banyak lembaga lain yang ikut terlibat dalam penyelesaian konflik di Thailand selatan ini tetapi cara dan metode serta sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, penulis tertarik bagaimana Indonesia memposisikan perannya dalam membantu menyelesaikan konflik yang melibatkan umat muslim di Thailand Selatan tahun 2004-2021.

---

<sup>15</sup> Tempo.co . “Muhammadiyah IKUT Fasilitasi Perdamaian Di Thailand Selatan.” *Tempo*. TEMPO.CO, September 21, 2008. Last modified September 21, 2008. Accessed September 14, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/136638/muhammadiyah-ikut-fasilitasi-perdamaian-di-thailand-selatan/full&view=ok>.

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk resolusi konflik di Thailand Selatan, akan tetapi masalah masih terjadi berlarut-larut sampai sekarang dan belum terciptanya perdamaian yang diharapkan semua pihak. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti alasan apa yang mendasari konflik ini menjadi konflik berkelanjutan dan belum bisa terselesaikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dialami masyarakat di Thailand Selatan adalah tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah pusat Thailand selama bertahun-tahun. Kemudian pemaksaan sentralisasi tidak hanya pemerintahan, tetapi juga budaya dan sosial. Ini merupakan cikal bakal terjadi ketimpangan sosial yang ada di Thailand Selatan.

Untuk mencari solusi dalam konflik di Thailand Selatan, pemerintah Thailand harus mempunyai solusi. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia meretas jalan menuju resolusi konflik. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand telah berlangsung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021.

Dengan penjabaran di atas, maka saya merumuskan masalah yaitu;

1. “Bagaimana perkembangan penanganan konflik di Thailand Selatan sampai sekarang?”
2. “Bagaimana Indonesia berperan dalam penanganan konflik yang dilakukan?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian saya berdasarkan rumusan masalah yang saya ambil bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari diplomasi multijalur Indonesia dalam penanganan konflik di Thailand Selatan tahun 2004-2021. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah mencari tahu dan mempelajari metode dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap konflik yang dialami oleh masyarakat muslim Melayu di provinsi Thailand Selatan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman. Dengan demikian masyarakat bisa lebih menyadari bahwa perpecahan itu selalu membawa kesengsaraan bagi semua pihak. Perbedaan ras suku dan agama seharusnya menjadi kekuatan kita bukan menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Selain itu juga kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang isu atau dinamika masalah yang ada di Thailand Selatan yang jarang dibahas di media masa maupun dalam jaringan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yang terdiri dari:

**BAB I:** Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang topik yang diambil, kemudian menentukan pertanyaan dari rumusan masalah, serta menjelaskan tujuan

dan kegunaan dari diadakannya penelitian ini.

**BAB II:** Pembahasan dalam bab ini adalah penulis Menyusun kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, pertama berisikan tentang tinjauan pustaka. Dalam bagian ini penulis memaparkan kajian-kajian dari sumber penelitian. Bagian kedua adalah penulis memaparkan teori-teori serta konsep yang akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

**BAB III:** Bagian ini adalah bagian dimana penulis menguraikan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Mulai dari pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian historis, analisis, Teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

**BAB IV:** Dalam bagian ini penulis menjelaskan elemen-elemen penting yang digunakan oleh diplomasi multijalur Indonesia dalam mengelola konflik di Thailand Selatan dalam kurun waktu 2004-2021.

**BAB V:** Pada bagian ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga memberikan saran dan pendapat terkait peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan.